



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 1521- Int-KLPPM/UNTAR/XI/2020**

Pada hari ini Senin tanggal 23 bulan November tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Henny Wirianata , S.E.,M.Si.,Ak., CA
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Tanjung Duren Utara, No. 1 Jakarta Barat 11470
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Nama : Viriany, S.E., M.M.,Ak.,CA, BKP
Jabatan : Dosen Tetap
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul **'Pelatihan Pembukuan Akuntansi Perpajakan pada CV Jaya Surya Integrasi'**
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.

- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak Juli-Desember Tahun 2020

Pasal 4

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan *Research Week*.

- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2020**

Pasal 6

- (1). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang disepakati, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D

Pihak Kedua

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 0,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Honorarium	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-

Jakarta, 23 November 2020
Pelaksana PKM



(Henny Wirianata , S.E.,M.Si.,Ak., CA)

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PELATIHAN PEMBUKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
PADA CV JAYA SURYA INTEGRASI**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Henny Wirianata , S.E.,M.Si.,Ak., CA (0321067701/10101020)

Anggota:

Viriany, S.E., M.M.,Ak.,CA, BKP (0326087602/10101021)

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JANUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II / Tahun 2020

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Judul | Pelatihan Pembukuan Akuntansi
Perpajakan pada CV Jaya Surya Integrasi
CV Jaya Surya Integrasi |
| 2. Nama Mitra PKM | |
| 3. Ketua Tim PKM | |
| a. Nama dan gelar | Henny Wirianata SE, MSi Ak, CA |
| b. NIDN/NIK | 0321067701 / 10101020 |
| c. Jabatan/Golongan | Asisten Ahli |
| d. Program Studi | S1 Akuntansi |
| e. Fakultas | Ekonomi |
| f. Bidang Keahlian | Akuntansi Keuangan |
| g. Alamat Kantor | Jl Tanjung Duren Utara No.1 Jakarta
Barat |
| h. Nomor HP/ Telp | 0812 8023 7125 |
| 4. Anggota Tim PKM | |
| a. Jumlah Anggota | Dosen 1 (satu) orang |
| b. Nama Anggota I/ bidang keahlian | Viriany / Akuntansi Keuangan
0326087602 / 10101021 |
| 5. Anggota Tim PKM (mahasiswa) | Mahasiswa 1 (satu) orang |
| a. Nama mahasiswa dan NIM | Felinda Yoe 125170393 |
| 6. Lokasi Kegiatan/ Mitra | |
| a. Wilayah Mitra | Cengkareng |
| b. Kabupaten/ Kota | Jakarta Barat |
| c. Provinsi | DKI Jakarta |
| d. Jarak PT ke lokasi mitra | 12 km |
| 7. Luaran yang dihasilkan | |
| a. Luaran Wajib | Artikel di SERINA 2020 |
| b. Luaran Tambahan | Modul Pelatihan Akuntansi Perpajakan |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | Agustus- Desember 2020 |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM | Rp 9.000.000 |


Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047

Jakarta, Januari 2021

Ketua Tim Pengusul


Henny Wirianata SE, M.Si, Ak, CA
0321067701 / 10101020

RINGKASAN

Menindaklanjuti Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada semester lalu selama bulan Januari sampai Juni 2020 maka kali ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara mengajukan diri untuk melakukan pelatihan pembukuan akuntansi perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi selama ini ke lokasi mitra, tim Pengabdian Kepada Masyarakat Untar menemukan bahwa CV Jaya Surya Integrasi perlu melakukan kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak CV Jaya Surya Integrasi ini maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Untar pada kesempatan ini telah melakukan pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.

Pelatihan dilakukan secara *online* mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir dan perlu melakukan *social distancing*. Media yang digunakan adalah Microsoft Teams. Dalam pelatihan ini Tim PKM memaparkan akuntansi perpajakan untuk transaksi CV Jaya Surya Integrasi yang memiliki dampak terhadap pelaporan pajak CV Jaya Surya Integrasi. Materi pelatihan mencakup pencatatan jurnal dan posting ke buku besar.

Setelah dilakukan pelatihan, diharapkan CV Jaya Surya Integrasi dapat mengaplikasikan akuntansi perpajakan untuk membukukan transaksi yang terjadi di perusahaan. Dengan mengaplikasikan akuntansi perpajakan maka akan memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak CV Jaya Surya Integrasi.

Kata kunci: Pelatihan, Akuntansi perpajakan

PRAKATA

Pertama - tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas kesempatan dan hibah yang diberikan kepada kami.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami yang berjudul Pelatihan Pembukuan Akuntansi Perpajakan pada CV Jaya Surya Integrasi akhirnya dapat diselesaikan. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mitra PKM dan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sama.

Laporan ini menguraikan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada mitra PKM, CV Jaya Surya Integrasi. Akhir kata, kami berharap laporan ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi Untar, FEB, dan Prodi S1 Akuntansi. Terima kasih

Januari 2021

Tim PKM

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM	8
BAB III METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	13
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim	13
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
4.1 Pelatihan I	14
4.2 Pelatihan II	15
4.3 Pelatihan III	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Modul Pelatihan
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama dari Mitra
- Lampiran 4 Luaran Wajib (Artikel SERINA 2020)
- Lampiran 5 Biodata Ketua Tim PKM, Anggota Tim PKM, dan Mahasiswa

BAB I PENDAHULUAN

1.1 ANALISIS SITUASI

1.1.1 Profil Mitra

CV Jaya Surya Integrasi (CV JSI) didirikan pada tahun 2015. CV JSI merupakan perusahaan dagang yang melakukan jual beli produk-produk yang berhubungan dengan komputer. CV JSI dipercaya sebagai salah satu agen resmi dari produk-produk komputer merk HP (*Hewlett Packard*). Produk-produk yang dijual diantaranya adalah Laptop, Printer, PC, dan perlengkapan komputer lainnya. CV JSI melakukan transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Pelanggan CV JSI ada yang perorangan dan ada perusahaan.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, CV JSI memiliki dua bagian, yaitu bagian penjualan dan administrasi. Oleh karena keterbatasan jumlah sumber daya/karyawan, maka ada beberapa bagian yang dirangkap oleh satu orang karyawan.

Tiap bagian dalam CV JSI memiliki deskripsi tugas yang berbeda, yaitu:

1. Bagian penjualan

Bagian penjualan terdiri dari satu orang karyawan tetap. Karyawan bagian penjualan bertugas untuk mencari pelanggan dan *memfollow up* pelanggan. Perusahaan sering mengikuti tender untuk berbagai proyek perusahaan lain. Bagian penjualan mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan untuk mengikuti tender, dengan bekerjasama dengan pemilik yang merupakan direktur langsung di CV JSI. Selain karyawan tetap CV JSI memiliki karyawan lepasan, yang dibayar per proyek. Karyawan lepasan biasanya mendapatkan komisi apabila berhasil mendapatkan proyek.

2. Bagian administrasi

Tugas bagian administrasi adalah membuat faktur penjualan, mencatat pengeluaran kas kecil, merekap rekening Koran, membuat rekapitulasi pembelian dan penjualan secara sederhana.

3. Direktur

Direktur dalam hal ini adalah pemilik masih banyak melakukan penjualan, negosiasi dengan pelanggan. Direktur juga masih melakukan pembelian secara

langsung ke supplier, sehingga pembuatan Purchase order masih dilakukan oleh Direktur.

Evaluasi pembagian tugas :

Pembagian tugas yang belum jelas sering menyebabkan kesalahan pencatatan administrasi. Walaupun pencatatan administrasi dilakukan secara sederhana namun tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

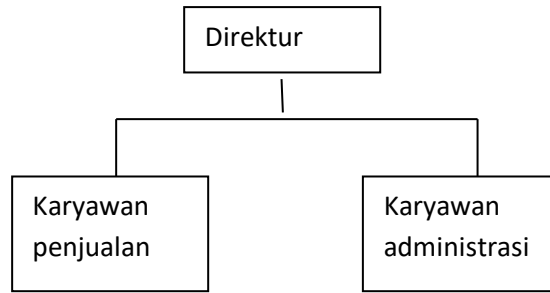
Banyak hal yang dilakukan secara pribadi oleh direktur menyebabkan bagian administrasi tidak melakukan pencatatan.

Misalnya :

1. Pembayaran hutang kepada supplier juga masih dilakukan secara langsung oleh Direktur. Hal ini terkadang menyebabkan bagian administrasi tidak mengetahui tentang pembelian yang dilakukan dan tidak melakukan pencatatan pembelian dan hutang.
2. Penagihan piutang juga dilakukan secara langsung oleh Direktur sekaligus pemilik ini. Hal ini menyebabkan masuknya uang ke rekening bank tetapi tidak diketahui oleh karyawan administrasi.
3. Pengeluaran uang di bank tidak diketahui oleh karyawan administrasi. Direktur langsung membayar kepada supplier tanpa memberitahu karyawan administrasi. Hal ini menyebabkan karyawan administrasi tidak memotong hutang.
4. Penerimaan uang di bank hanya diketahui oleh direktur, karyawan administrasi tidak mengetahuinya sehingga tidak melakukan pelunasan piutang dan terkadang melakukan penagihan piutang.
5. Pembayaran beban , penarikan prive dilakukan oleh direktur sehingga karyawan tidak mengetahui transaksi yang dilakukan direktur dan tidak mencatatnya.

Hal-hal yang banyak dilakukan secara pribadi oleh direktur ini disebabkan kurangnya komunikasi antara direktur dengan karyawan administrasi. Karyawan administrasi enggan bertanya karena segan dengan direkturnya. Sedangkan direktur sering lupa memberitahu karyawan tentang transaksi yang dilakukan secara pribadi oleh direkturnya. Akibatnya pencatatan secara sederhana yang dilakukan oleh karyawan administrasi pun menjadi berantakan.

Struktur organisasi dari CV JSI dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi CV JSI

1.1.2 Landasan Teori

1.1.2.1. Proses Bisnis Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki proses bisnis yaitu rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Dalam perusahaan dagang, proses bisnis perusahaan meliputi aktivitas pembelian barang dagang dan aktivitas penjualan barang dagang. Sementara, dalam perusahaan manufaktur, proses bisnis perusahaan meliputi aktivitas pembelian, aktivitas produksi, dan aktivitas penjualan (Ardana dan Lukman, 2016).

Ardana dan Lukman (2016) mengemukakan ada tiga jenis proses bisnis, yaitu:

1. Proses Manajemen

Proses manajemen meliputi tata kelola korporasi dan manajemen stratejik. Dengan demikian, proses manajemen akan mencerminkan tata kelola dan gaya manajemen dalam proses bisnis yang berjalan.

2. Proses Operasi

Proses operasi menggambarkan inti dari perusahaan, yaitu meliputi proses pembelian, manufaktur, pemasaran, dan penjualan.

3. Proses Pendukung

Proses pendukung meliputi proses akuntansi, keuangan, personalia, dan proses pendukung lainnya yang mendukung proses inti perusahaan.

Dalam setiap proses bisnis terdapat beberapa prosedur transaksi. Prosedur transaksi merupakan urutan beberapa siklus transaksi yang melibatkan lebih dari satu bagian atau orang yang berbeda. Siklus transaksi itu sendiri merupakan rangkaian dua atau lebih peristiwa yang terjadi secara teratur dan berurutan, dan terjadinya peristiwa yang terakhir akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan (Ardana dan Lukman, 2016).

Setiap bagian akan mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukannya sebagai bukti adanya suatu transaksi atau peristiwa dan menjadi dasar pencatatan di buku perusahaan. Prosedur transaksi yang terjadi di perusahaan akan menggambarkan peran masing-masing bagian, urutan kegiatan, dan juga menggambarkan alur dokumentasi dari setiap transaksi yang terjadi (Ardana dan Lukman, 2016).

Untuk memudahkan dalam memahami proses bisnis yang terjadi di perusahaan, perusahaan pada umumnya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap prosedur transaksi terjadi. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanaga telah melakukan penyusunan Standar Penyusunan Operasional Prosedur selama 1 tahun untuk CV JSI dan telah dijelaskan dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat semester Ganjil 2019/2020 dan semester Genap 2019/2020.

1.1.2.2 Bisnis Perusahaan

Dengan berkembangnya penjualan secara online, banyak perusahaan didirikan untuk turut meramaikan pasar online. Perusahaan yang baru berdiri berharap dapat mendapatkan *market share* dari besarnya pasar *online*.

Perusahaan yang melakukan penjualan berbasis *online* biasanya memiliki struktur organisasi yang ramping. Mereka mempunyai karyawan yang sedikit, tempat kerja yang tidak permanen.

Kegiatan perusahaan dapat dijalankan di mana saja hanya dengan menggunakan komputer yang mempunyai akses internet, bahkan ada banyak perusahaan yang menggunakan telpon genggam.

Namun banyak pemilik memilih melegalkan perusahaan dengan menggunakan badan hukum supaya pelaporan pajaknya dapat dilakukan terpisah

dengan harta pemilik. Badan hukum yang digunakan biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau CV.

Pemerintahan mengharapkan perusahaan yang berbadan hukum menyelenggarakan pembukuan. Karena perusahaan berbasis *online* maka karyawan sangat sedikit sehingga pembukuan seringkali diabaikan.

Walaupun dari sisi pemilik, sebenarnya mereka mengharapkan setiap transaksi bisnis perlu dicatat baik secara manual maupun komputerisasi, namun mereka tidak mempunyai waktu dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan pembukuan karena struktur organisasi yang ramping membuat mereka fokus kepada pencarian omzet.

Tujuan dilakukannya pencatatan salah satunya adalah supaya perusahaan mempunyai arsip apa saja yang sudah dilakukan, berapa banyak uang yang dikeluarkan, berapa banyak uang yang diterima, berapa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dan lain-lain. Pembukuan dapat dilakukan secara sederhana asalkan tujuan utama pembukuan terpenuhi.

Perusahaan sering melupakan pembukuan karena mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Perusahaan jarang sekali mengalokasikan dana untuk melakukan pembukuan, mereka hanya menjalankan bisnis saja. Akibatnya bila perusahaan membutuhkan informasi historis maka perusahaan tidak akan mendapatkannya. perusahaan juga tidak bisa melihat perkembangan bisnis yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki pembukuan yang memadai sesuai dengan bidang usaha dan perkembangan bisnisnya.

1.1.2.3 Kewajiban perpajakan

Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017)

Pajak adalah sumber keuangan negara (fungsi Budgetair) dan pengatur (regularend). Pajak dapat dikenakan secara langsung, pajak tidak langsung. Contoh pajak yang dikenakan secara langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan

Nilai). Sedangkan contoh pajak yang tidak dikenakan secara langsung adalah PPH (Pajak Penghasilan).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai salah satu wajib pajak, para pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dalam membukukan aspek perpajakan atas transaksi yang dilakukannya.

Kebijakan Pemerintah dalam PP No. 23 tahun 2018 mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0,5% untuk UMKM orang pribadi dan UMKM badan yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 milyar. Namun, ketentuan ini berlaku hanya 7 tahun untuk UMKM orang pribadi dan 3 tahun untuk UMKM badan. Setelah berakhirnya masa tersebut maka perhitungan pajak penghasilan UMKM baik UMKM orang pribadi maupun badan akan mengikuti ketentuan Pajak Penghasilan pasal 17 yang sama dengan pelaku usaha yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 milyar. Oleh karena itu, penting bagi UMMKM memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan agar UMKM siap secara pembukuan dan administrasi.

Sandra, et. al. (2019) melakukan kegiatan PKM dalam bentuk pendampingan pajak UMKM. Kegiatan PKM tersebut dalam bentuk pembuatan pembukuan sederhana bagi wajib pajak UMKM di wilayah Pulo Gadung. Dalam kegiatannya tersebut, Sandra, et. al. (2019) mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM sehingga meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM. Kegiatan PKM dari Tim Untar juga akan melakukan hal yang sama, dimana kegiatan PKM dilakukan dengan memberikan pelatihan akuntansi pajak sebagai salah satu bentuk pendampingan pajak bagi UMKM.

1.2 PERMASALAHAN MITRA

CV JSI adalah merupakan salah satu wajib pajak badan. Saat ini, CV Jaya Surya Integrasi adalah perusahaan yang memiliki omset penjualan di atas 4,8 Milyar setahun sehingga secara otomatis akan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau biasanya yang sering disebut PKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1983 dan perubahannya.

Sesuai dengan Undang-undang No.9 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.42 tahun 2009 maka CV Jaya Surya Integrasi wajib membayar dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukannya.

Dan sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 maka CV JSI juga wajib membayar dan melaporkan Pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya, dan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk jasa (misalnya sewa) yang diperoleh atau diberikannya, Pajak penghasilan pasal 25 untuk cicilan tahunan pph badan, Pajak Penghasilan pasal 29 untuk Kekurangan bayar atas Pajak penghasilan badan tahunan.

Perusahaan belum memiliki pencatatan akuntansi yang jelas terutama yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi perpajakan. Melihat skala operasional CV Jaya Surya Integrasi yang telah memiliki omzet penjualan di atas 4,8 Milyar setahun, maka CV Jaya Surya Integrasi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang termasuk Pengusaha Kena Pajak atau biasanya yang sering disebut PKP.

Catatan akuntansi terutama transaksi pembelian dan penjualan sangat penting bagi PKP karena berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh mitra akan menimbulkan PPN masukan, sementara transaksi penjualan akan menimbulkan PPN keluaran. Pencatatan atas PPN akan diperhitungkan di setiap akhir periode untuk menentukan kewajiban perpajakan dari perusahaan mitra.

Oleh karena itu, dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Tim Universitas Taumanagara diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi perusahaan yang belum memiliki pencatatan yang benar tentang semua transaksi yang terjadi di perusahaan terutama yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukan oleh CV Jaya Surya Integrasi.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi yang dilakukan tim PKM Untar dengan pihak CV JSI, maka tim PKM Untar menawarkan solusi untuk Melakukan pelatihan akuntansi perpajakan. Karena kondisi pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan secara luring (tatap muka) maka pelatihan akan dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Zoom atau Google meet atau Microsoft Teams.

Pelatihan akan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu:

1. Tanggal 9 Oktober 2020, waktu pelatihan 2 jam.
2. Tanggal 16 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.
3. Tanggal 23 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.

2.2 LUARAN KEGIATAN PKM

Luaran PKM yang dihasilkan adalah modul pelatihan Akuntansi perpajakan. Adapun modul pelatihan akuntansi perpajakan yang digunakan terdiri dari :

1. Pendahuluan yang membahas definisi pajak, jenis pajak, pengertian pembukuan bagi wajib pajak
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penghasilan (PPh) yang mencakup PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh 4 ayat 2 , PPh pasal 25, PPh pasal 28 dan PPh pasal 29

Di bawah ini akan dijelaskan sebagian mengenai modul yang akan diajarkan kepada CV Jaya Surya Integrasi :

Akuntansi Perpajakan untuk pembelian dan penjualan barang dagang

Setiap kali terjadi pembelian maka persediaan barang dagang akan bertambah. Dan sebaliknya apabila terjadi penjualan maka persediaan barang dagang akan berkurang.

Berikut ini adalah jurnal untuk pembelian dan penjualan barang dagang dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai):

Saat Pembelian :

Dr. Pembelian /Persediaan barang dagang	xxx	
Dr. PPN Masukan	xxx	
Cr. Kas /hutang dagang		xxx

Saat Penjualan :

Dr. Kas / Piutang dagang	xxx	
Cr. Penjualan	xxx	
Cr. PPN Keluaran		xxx

Apabila terdapat perbedaan persediaan barang dagang yang di gudang dengan yang dicatat oleh bagian akuntansi maka akan dilakukan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi. Dengan jurnal sebagai berikut (tidak perlu mencatat PPN):

Sistem Perpetual

Apabila Persediaan barang di gudang > catatan akuntansi

Dr. Persediaan barang dagang	xxx	
Cr Harga Pokok Penjualan		xxx

Apabila persediaan barang di gudang < catatan akuntansi

Dr. Harga Pokok Penjualan	xxx	
Cr. Persediaan barang dagang		xxx

Sistem Periodik

Menutup persediaan awal

Dr. Iktisar laba rugi	xxx	
Cr Persediaan barang dagang		xxx

Memunculkan persediaan akhir sesuai hasil pemeriksaan fisik

Dr. Persediaan barang dagang	xxx	
Dr. Iktisar Laba rugi		xxx

PPh pasal 21

Dikenakan atas gaji/bonus/penghasilan dan sejenisnya yang diperoleh oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan tiap bulannya.

Jurnalnya pada saat pembebanan gaji

Dr. Beban Gaji	xxx	
Dr. Beban PPh 21	xxx	
Cr. Bank/ kas		xxx
Cr. Hutang PPh 21		xxx

Jurnalnya pada saat pembayaran hutang pph 21

Dr. Hutang PPh 21	xxx	
Cr. Bank/kas		xxx

PPh pasal 23

Salah satu yang diatur oleh PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2.

Jurnalnya pada saat pembebanan sewa :

Dr. Beban Sewa/sewa dibayar dimuka	xxx	
Dr. PPN Masukan	xxx	
Cr. Hutang PPh pasal 23		xxx
Cr. Bank/Kas		xxx

Jurnalnya pada saat pembayaran hutang PPh 23

Dr. Hutang PPh 23	xxx	
Cr. Bank/kas		xxx

Apabila perusahaan yang mendapatkan pendapatan sewa maka jurnalnya :

Dr. Bank/kas	xxx	
Dr. PPh pasal 23 dibayar dimuka	xxx	
PPN Keluaran		xxx
Pendapatan sewa		xxx

PPh pasal 4 ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas sewa tanah dan bangunan.

Jurnal pada waktu pembebanan sewa

Dr. Sewa dibayar dimuka	xxx	
Dr. PPN Masukan	xxx	
Cr. Hutang PPh pasal 4 ayat 2		xxx
Cr. Bank/Kas		xxx

Jurnal pada waktu membayar hutang PPh pasal 4 ayat 2

Dr. Hutang PPh pasal 4 ayat 2	xxx	
Cr. Bank/kas		xxx

Dari sisi pihak yang menyewakan tanah dan bangunan

Dr. Bank/kas	xxx	
Dr. Beban PPh 4 ayat 2	xxx	
Cr. PPN Keluaran		xxx
Cr. Pendapatan sewa		xxx

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 LANGKAH-LANGKAH/ TAHAPAN PELAKSANAAN

Ada beberapa metode untuk mengajar atau mengadakan pelatihan, seperti yang dikutip dari Nana Sudjana (2010) yaitu : Metode ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Resitasi, Metode Kerja Kelompok, Metode Demonstrasi dan Eksperimen, Metode sosiodrama (role-playing), Metode *problem solving*, Metode sistem regu (team teaching), Metode latihan (*drill*), Metode karyawisata (*Field-trip*), Metode survai masyarakat, dan Metode simulasi. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan.

Pada PKM kali ini tim akan menggunakan berbagai kombinasi metode untuk melakukan pelatihan Akuntansi Perpajakan yaitu Metode Ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, dan metode latihan.

Metode ceramah adalah pelatihan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada peserta pelatihan. Kebanyakan porsi bicara akan didominasi oleh pelatih dalam hal ini adalah tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

Metode Diskusi akan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk melakukan diskusi atas materi yang diberikan. Pelatihan akan berlangsung dua arah sehingga memungkinkan peserta untuk berdiskusi mengenai materi pelatihan yang diberikan.

Metode Tanya jawab akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut.

Metode latihan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk latihan soal-soal yang menggambarkan situasi di dunia kerja. Kemungkinan akan diberikan soal-soal Latihan langsung yang sesuai dengan praktek di lapangan atau dapat juga menggunakan kondisi nyata yang sedang terjadi di CV Jaya Surya Integrasi terutama kondisi nyata yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang terjadi di perusahaan.

3.2 PARTISIPASI MITRA DALAM KEGIATAN PKM

Pada saat tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara berdiskusi dengan pimpinan CV Jaya Surya Integrasi maka disepakati akan dilakukan pelatihan akuntansi perpajakan. Ini bukan pertama kalinya tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara mengadakan Kerjasama dengan CV Jaya Surya Integrasi. Pimpinan Perusahaan akan berkomitmen untuk meminta karyawannya mengikuti pelatihan yang diadakan nanti pada tanggal 9, 16, dan 23 oktober 2020 melalui media Google Meet dan Microsoft Teams. Dan pimpinan perusahaan berharap nantinya perusahaan dapat menjalankan hasil pelatihan yang dilakukan.

3.3 KEPAKARAN DAN PEMBAGIAN TUGAS TIM

Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yaitu ketua pengusul dan 1 (satu) anggota dosen pengusul dan 1 (satu) orang anggota mahasiswa .

Ketua dan anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Taumanagara adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi yang sehari-hari mengajar mata kuliah Akuntansi Dasar, Akuntansi Keuangan Menengah , Akuntansi Keuangan Lanjutan, dan Akuntansi Perpajakan. Ketua dan anggota dosen juga terlibat aktif dalam melakukan pelatihan pembukuan ke berbagai perusahaan dengan bantuan dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara. Selain itu Ketua dan Anggota telah memperoleh sertifikasi dosen di bidang keahlian yang dimiliki sehingga memungkinkan untuk melakukan pelatihan akuntansi perpajakan yang diusulkan.

.Anggota mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Tarumanagara semester 7 (tujuh) yang membantu dalam pembuatan materi pelatihan sekaligus juga membantu pelaksanaan pelatihan akuntansi perpajakan yang akan dilakukan oleh tim PKM Untar.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi yang dilakukan tim PKM Untar dengan pihak CV JSI, maka tim PKM Untar telah melakukan pelatihan akuntansi perpajakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tanggal 9 Oktober 2020, waktu pelatihan 2 jam.
2. Tanggal 16 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.
3. Tanggal 23 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.

Karena kondisi pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan secara luring (tatap muka) maka pelatihan dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan platform *Google Meet* dan *Microsoft Teams*.

Materi pelatihan disampaikan dalam bentuk mini webinar. Metode penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan menggunakan kondisi nyata yang sedang terjadi di CV Jaya Surya Integrasi terutama kondisi nyata yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang terjadi di perusahaan.

Materi pelatihan diberikan kepada CV JSI dalam bentuk *softcopy* (PDF) dari luaran PKM yang dihasilkan. Luaran PKM yang dihasilkan adalah modul Akuntansi Perpajakan untuk CV Jaya Surya Integrasi yang terdiri dari 3 modul, yaitu:

1. Modul 1 Pendahuluan yang membahas definisi pajak, jenis pajak, pengertian pembukuan bagi wajib pajak
2. Modul 2 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Modul 3 Akuntansi Pajak Penghasilan

4.1. Pelatihan I

Pelatihan I dilakukan pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 2 jam. Dalam pelatihan ini, Tim PKM Untar memaparkan materi pada Modul 1. Tujuan pemaparan materi pada Modul 1 adalah agar pihak mitra UMKM memiliki pengetahuan dasar tentang pengertian pajak, Laporan Keuangan UMKM, dan pentingnya akuntansi pajak bagi UMKM. Pemaparan materi lebih banyak membahas tentang penjelasan teoritis dan pengetahuan secara konsep.

Pada pemaparan materi pengertian pajak, Tim PKM Untar juga memaparkan tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada pihak mitra UMKM.

Setelah itu dilakukan pemaparan tentang Laporan Keuangan UMKM. Materi yang disampaikan lebih kepada penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan UMKM. Sementara, untuk cara penyusunan Laporan Keuangan telah disampaikan pada pihak mitra pada kegiatan PKM yang sebelumnya.

Inti dari Modul 1 adalah pada pemaparan materi berikutnya tentang akuntansi perpajakan bagi UMKM. Dalam kesempatan ini, Tim PKM Untar memaparkan landasan hukum kenapa diperlukan akuntansi perpajakan, tujuan akuntansi perpajakan, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi perpajakan di Indonesia. Selain itu, Tim PKM Untar juga menjelaskan tentang pentingnya akuntansi perpajakan bagi UMKM dengan berkaca pada pengalaman terjadinya kesalahan-kesalahan pada UMKM lain dalam menerapkan akuntansi perpajakan.

Setelah dilakukan pemaparan materi dari Modul 1, Tim PKM Untar memberikan kesempatan kepada mitra UMKM untuk melakukan tanya jawab agar pihak mitra UMKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan pada pelatihan I dapat dilihat bahwa pihak mitra UMKM dapat memahami materi yang disampaikan.

4.2. Pelatihan II

Pemaparan materi dari Modul 2 dibagi dalam 2 pelatihan, yaitu pelatihan II dan III. Pelatihan II diadakan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 1,5 jam. Dalam pelatihan II, Tim PKM Untar melakukan pemaparan tentang materi pada Modul 2. Tujuan pertama Modul 2 adalah agar pihak mitra UMKM memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Modul 2 bertujuan untuk memberikan pemahaman akuntansi perpajakan untuk PPN.

Pemaparan materi diawali dengan penjelasan tentang Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yaitu tentang peraturan perpajakan atas PPN untuk pembelian dan penjualan

barang dagang di Indonesia. Penjelasan disertai dengan contoh aplikasi dari undang-undang tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan tentang akuntansi perpajakan untuk PPN dari pembelian dan penjualan barang dagang.

Tim PKM Untar memberikan penjelasan tentang konsep dan cara membukukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang di Indonesia yang dikenakan PPN. Penjelasan mencakup pembuatan jurnal untuk transaksi pembelian barang dagang, retur pembelian, penjualan barang dagang, retur penjualan, dan jurnal penyesuaian di akhir periode. Selain itu, pihak mitra diberikan penjelasan tentang kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang pajak atau hutang pajak bagi pihak mitra UMKM atas transaksi pembelian dan penjualan barang dagang.

Pemaparan materi pada pelatihan II merupakan pemaparan dari segi teori, konsep, dan peraturan perpajakan di Indonesia. Pemaparan Modul 2 dilanjutkan pada pelatihan III yang menjelaskan penerapan akuntansi perpajakan atas PPN untuk transaksi dan pembukuan di pihak mitra UMKM, CV Jaya Surya Integrasi.

Selama pelatihan II berlangsung, pihak mitra UMKM dan Tim PKM Untar juga melakukan diskusi dan tanya jawab. Sebagai PKP, CV Jaya Surya Integrasi telah melakukan kewajiban perpajakan terkait PPN namun masih belum menerapkan akuntansi perpajakan untuk PPN. Setelah berakhirnya pelatihan II dapat dikatakan bahwa pihak mitra UMKM telah memiliki pengetahuan secara konseptual tentang peraturan perpajakan dan akuntansi perpajakan terkait PPN.

4.3. Pelatihan III

Pelatihan III dilakukan pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 1,5 jam. Pelatihan III melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan pada pelatihan II. Pada pelatihan III, materi yang disampaikan merupakan penerapan akuntansi perpajakan pada pembukuan CV Jaya Surya Integrasi. Tim PKM Untar menggunakan contoh beberapa transaksi yang pernah terjadi di CV Jaya Surya Integrasi.

Pelatihan III dilakukan dengan metode diskusi untuk membahas penerapan akuntansi perpajakan atas PPN yang timbul dari pembelian dan penjualan barang dagang yang dilakukan CV Jaya Surya Integrasi.

Selain membahas pencatatan jurnal, dalam pelatihan III juga dibahas pembuatan Kartu persediaan dan jurnal penyesuaian CV Jaya Surya Integrasi. Kemudian, dijelaskan tentang *posting* ke Buku Besar untuk PPN Masukan dan PPN Keluaran CV Jaya Surya Integrasi.

Mengacu pada saldo PPN Masukan dan PPN Keluaran di buku besar CV Jaya Surya Integrasi, maka setelah itu dijelaskan penerapan penentuan timbulnya piutang pajak atau hutang pajak. Dengan pembahasan ini, CV Jaya Surya Integrasi dapat menentukan kewajiban perpajakan yang harus dilaporkannya kepada pemerintah.

Dalam pelatihan III, Tim PKM untar juga membahas tentang Modul 3 Akuntansi Pajak Penghasilan. Dengan berakhirnya pelatihan III, maka pelatihan akuntansi perpajakan untuk PPN bagi CV Jaya Surya Integrasi telah selesai. Dari pelatihan III, CV Jaya Surya Integrasi telah memahami penerapan akuntansi perpajakan untuk PPN, sehingga CV Jaya Surya Integrasi dapat menghindari terjadinya kesalahan pada perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Luaran modul yang disampaikan selama pelatihan I, II, dan III kepada CV Jaya Surya Integrasi dapat dilihat pada Lampiran 1 di akhir laporan ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan PKM dilakukan dengan memberikan pelatihan dalam bentuk mini webinar kepada pihak mitra, yaitu CV Jaya Surya Integrasi. Adapun pelatihan yang diberikan adalah tentang Akuntansi Pajak yang disampaikan dalam 3 modul pelatihan, yaitu:

1. Modul 1 Pendahuluan yang membahas tentang pengertian pajak, Laporan Keuangan UMKM dan pentingnya akuntansi perpajakan bagi UMKM.
2. Modul 2 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai membahas tentang ketentuan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan akuntansi pajaknya.
3. Modul 3 Akuntansi Pajak Penghasilan membahas tentang ketentuan pajak dan akuntansi pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak mitra, CV Jaya Surya Integrasi dapat memahami ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dan pajak penghasilan yang diperlukan oleh CV Jaya Surya Integrasi. Pihak mitra juga telah memahami akuntansi pajak yang disampaikan dan telah mencoba menerapkan akuntansi pajak tersebut dalam pembukuannya. Dengan menerapkan akuntansi pajak secara benar maka diharapkan akan memudahkan CV Jaya Surya Integrasi untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak kepada pemerintah. Dengan demikian, CV Jaya Surya Integrasi diharapkan dapat menerapkan akuntansi pajak yang telah disampaikan dalam pelatihan ini secara konsisten. Konsistensi dalam penerapan akan membantu CV Jaya Surya Integrasi untuk memiliki pembukuan yang rapi dengan informasi yang dapat diandalkan, sehingga di masa depan dapat dimanfaatkan dalam memperoleh tambahan dana untuk pengembangan usaha.

5.2 Saran

Seiring dengan perkembangan usaha, ke depannya pelatihan dapat ditambah dengan *update* peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan meng-*update* peraturan perpajakan yang terbaru diharapkan dapat semakin mengikuti perkembangan pajak dan memberikan sumbangsih kepada pemerintah.. Selain itu, pelatihan juga dapat ditambah dengan penggunaan *software* akuntansi sehingga pembukuan pajak CV Jaya Surya Integrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta Salemba Empat
- Ardana, I Cenik, dan Hendro Lukman. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Isroah. (2013). Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM. *Jurnal Nominal*, Volume II Nomor I Tahun 2013. DOI: <https://doi.org/10.21831/nominal.v2i1.1649>
- Resmi, Siti. *Perpajakan*. Edisi 10. Jakarta. Salemba Empat
- Sandra, A., Hanif, R. I. Arfianti, dan P. Apriwenni (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal*, Volume 1, Number 1, 2019, 1-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.33021/aia.v1i1.737>
- Sudjana, Nana (2010) . *Dasar-dasar Proses Belajar*, Bandung. Sinar Baru.
- Weygandt, Kimmel, Kieso (2018). *Financial Accounting*. IFRS Edition. US : Wiley
- Republik Indonesia (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2013). PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. (2018). PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- www.pajak.go.id
- <https://solusiukm.com/akuntansi-perpajakan-pada-perusahaan-dan-umkm-mengapa-penting/>
- <https://solusiukm.com/4-kesalahan-akuntansi-perpajakan-pada-usaha-kecil-atau-umkm-yang-sering-dilakukan/>

Lampiran 1 Modul Pelatihan

MODUL PELATIHAN AKUNTANSI PERPAJAKAN



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**DISAMPAIKAN DALAM RANGKA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA CV JAYA SURYA INTEGRASI**

Disusun oleh:

Henny Wirianata , S.E.,M.Si.,Ak., CA
Viriany, S.E., M.M.,Ak.,CA, BKP

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

MODUL 1

PENDAHULUAN

A. Tujuan:

Pihak mitra memahami pengertian pajak, Laporan Keuangan UMKM dan pentingnya akuntansi perpajakan bagi UMKM.

B. Pembahasan:

1.1. Pengertian

Menurut Prof Dr Rochmat Soemitro S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017)

Pajak adalah sumber keuangan negara (fungsi Budgetair) dan pengatur (regularend). Pajak dapat dikenakan secara langsung, pajak tidak langsung. Contoh pajak yang dikenakan secara langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sedangkan contoh pajak yang tidak dikenakan secara langsung adalah PPH (Pajak Penghasilan).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai tahun 1983 dan perubahannya.

Sesuai dengan Undang-undang No.9 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.42 tahun 2009 maka perusahaan wajib membayar dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukannya.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 maka perusahaan juga wajib membayar dan melaporkan Pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawannya, dan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk jasa (misalnya sewa) yang diperoleh atau diberikannya,

Pajak penghasilan pasal 25 untuk cicilan tahunan PPh badan, dan Pajak Penghasilan pasal 29 untuk Kekurangan bayar atas Pajak penghasilan badan tahunan.

1.2. Laporan Keuangan UMKM

Setiap perusahaan harus menyusun Laporan Keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Penyusunan Laporan Keuangan yang baik adalah dengan menyusunnya sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Standar akuntansi untuk menyusun Laporan Keuangan UMKM berbeda dari standar akuntansi untuk perusahaan non-UMKM. Hal ini karena UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan non-UMKM.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan satu standar akuntansi untuk UMKM. Tahun 2016, DSAK mengesahkan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah). Sesuai dengan namanya, SAK EMKM dirancang khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai Undang-Undang No 20 Tahun 2008.

SAK EMKM ini dinyatakan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. SAK-EMKM merupakan standar akuntansi untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Dengan diterbitkannya SAK-EMKM, diharapkan dapat membantu perusahaan kecil dan perusahaan menengah dalam menyusun Laporan Keuangan. Dengan memiliki Laporan Keuangan yang sesuai standar maka akan memudahkan UMKM dalam mendapatkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam SAK-EMKM disebutkan bahwa Laporan Keuangan minimum yang harus disusun oleh UMKM terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Posisi Keuangan UMKM mencakup penyajian kas dan setara kas, piutang baik piutang dagang ataupun piutang non-dagang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan modal/ekuitas. Dalam Laporan Laba Rugi UMKM disajikan besarnya pendapatan, beban-beban operasional, dan beban pajak. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk membantu memberikan informasi penjelasan tambahan yang relevan dengan penyajian pos-pos yang ada di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi, diantaranya adalah rincian setiap pos, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi material lainnya.

1.3. Akuntansi Perpajakan Bagi UMKM

Dalam menyusun Laporan Keuangannya, UMKM harus memperhatikan pengaruh pajak yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan UMKM. Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan kas negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik maka UMKM wajib melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan UMKM akan mempengaruhi pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia memberlakukan *Self Assessment System*, yaitu dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak perusahaan, untuk menghitung sendiri jumlah pajak mereka yang terhutang/akan disetorkan ke pemerintah. Termasuk juga dalam hal dalam penyeteroran pajak yang terhutang dan jika terjadi kekurangan pajak (<https://solusiukm.com/akuntansi-perpajakan-pada-perusahaan-dan-umkm-mengapa-penting/>).

Untuk menerapkan *Self Assessment System*, wajib pajak yang ada di Indonesia harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berlaku untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak perusahaan, termasuk UMKM. Selain memahami peraturan yang berlaku, wajib pajak juga perlu memahami proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak ke pemerintah.

Pada tahun 2016 saat pemerintah Indonesia mengumumkan adanya *Tax Amnesty*, banyak wajib pajak dan para pelaku usaha termasuk UMKM yang tidak memahami bagaimana menghitung beban pajak yang harus dibayarkan terkait *Tax Amnesty* dan tidak memahami bagaimana melaporkannya. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka akuntansi pajak diperlukan untuk membantu wajib pajak dalam menerapkan *Self Assessment System*.

Akuntansi pajak memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Pertama, akuntansi pajak dapat membantu para pelaku usaha untuk membuat perencanaan pajak. Kedua, akuntansi pajak dapat membantu untuk menghitung besarnya pajak perusahaan di masa depan. Ketiga, dengan menerapkan akuntansi pajak, perusahaan dapat mengimplementasikan aspek perpajakan dari

perlakuan akuntansi dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Keempat, akuntansi perpajakan dapat menjadi dokumentasi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan kewajiban pajak perusahaan. Kelima, akuntansi pajak membantu pemerintah dalam melindungi pendapatan negara karena perusahaan dapat menghitung dan melaporkan kewajibannya dengan baik (<https://solusiukm.com/akuntansi-perpajakan-pada-perusahaan-dan-umkm-mengapa-penting/>).

Akuntansi pajak juga memiliki prinsip yang sama dengan akuntansi pada umumnya. Diantaranya adalah prinsip entitas akuntansi dimana satu entitas usaha dapat berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi pajak juga memiliki prinsip kesinambungan, yang artinya entitas usaha dipercaya akan terus melanjutkan operasionalnya. Pembukuan akuntansi pajak juga memiliki prinsip konsistensi, dimana pencatatan dilakukan dengan perlakuan yang konsisten, dan dilakukan perubahan jika memang diharuskan dan dengan alasan yang sesuai. Selain itu, transaksi yang dicatat dalam akuntansi pajak merupakan transaksi yang tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi. (<https://solusiukm.com/akuntansi-perpajakan-pada-perusahaan-dan-umkm-mengapa-penting/>).

Meskipun ada UMKM yang telah menerapkan akuntansi pajak, seringkali terjadi kesalahan-kesalahan dalam penerapan akuntansi pajak pada UMKM. Pemerintah menetapkan tarif pajak yang ringan bagi UMKM dengan tujuan agar UMKM patuh dalam membayar pajak. Namun, para pelaku UMKM sering kali terlupa untuk melakukan pembayaran setoran pajak secara tepat waktu. Akibatnya, UMKM akan terkena denda yang mengakibatkan pembayaran pajak jadi lebih besar dari yang seharusnya.

Para pelaku UMKM seringkali salah dalam menghitung beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Para pelaku UMKM mungkin saja mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku untuk UMKM tetapi mereka tidak memahaminya. Sehingga banyak pemilik dari UMKM menjadi terkejut dengan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan akibat kesalahan dalam menghitung.

Selain itu, pemilik dari UMKM juga seringkali tidak memisahkan catatan keuangan pribadi dan keuangan UMKM. Hal ini mengakibatkan dasar perhitungan beban pajak UMKM menjadi salah dan tidak tepat. Kekurang pahaman para pelaku

UMKM tentang pembukuan juga menjadi kendala timbulnya kesalahan dalam menghitung perpajakan UMKM (<https://solusiukm.com/4-kesalahan-akuntansi-perpajakan-pada-usaha-kecil-atau-umkm-yang-sering-dilakukan/>). Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk memahami pembukuan dan akuntansi pajak untuk UMKM sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam menyajikan informasi pada Laporan Keuangan termasuk informasi pajak UMKM.

Secara umum, akuntansi pajak dalam transaksi UMKM diterapkan untuk transaksi yang dipengaruhi aspek Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan setoran pajak oleh UMKM. Akuntansi untuk masing-masing pajak tersebut akan dibahas lebih lanjut pada modul berikutnya.

MODUL 2

AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. Tujuan:

1. Pihak mitra memahami peraturan pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pihak mitra memahami akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai.

B. Pembahasan:

2.1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang No. 42 tahun 2009 mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pembelian dan penjualan barang dagang. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% atas dasar pengenaan pajak, yaitu salah satunya adalah harga jual barang. Oleh karena itu nilai yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual adalah sebesar harga jual barang setelah ditambahkan PPN. Contoh perhitungan sebagai berikut:

PT XYZ menjual 50 unit barang tipe A kepada PT KLM dengan harga jual Rp 1.000.000 per unit. Harga jual ini belum termasuk PPN sebesar 10%. Maka harga yang harus dibayarkan oleh PT KLM dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual barang} &= 50 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.000.000 &&= \text{Rp } 50.000.000,00 \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 50.000.000 &&= \underline{\text{Rp } 5.000.000,00} \\ \text{Total} &&&= \mathbf{\text{Rp } 55.000.000,00} \end{aligned}$$

Apabila harga jual Rp 1.000.000 per unit sudah termasuk PPN, maka harga yang harus dibayarkan oleh PT KLM adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual barang} &= 50 \text{ unit} \times 100/110 \times \text{Rp } 1.000.000 &&= \text{Rp } 45.454.545,45 \\ \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 45.454.545,45 &&= \underline{\text{Rp } 4.545.454,55} \\ \text{Total} &= 50 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.000.000 &&= \mathbf{\text{Rp } 50.000.000,00} \end{aligned}$$

2.2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dalam akuntansi pajak, jurnal untuk pembelian dan penjualan barang dagang dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

Transaksi	Sistem Periodik	Sistem Perpetual
Pembelian Barang Dagang	Dr. Pembelian xxx Dr. PPN Masukan xxx Cr. Kas/Hutang Dagang xxx	Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Dr. PPN Masukan xxx Cr. Kas/Hutang Dagang xxx
Retur Pembelian	Dr. Kas/Hutang Dagang xxx Cr. Retur Pembelian xxx Cr. PPN Masukan xxx	Dr. Kas/Hutang Dagang xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. PPN Masukan xxx
Penjualan Barang Dagang	Dr. Kas/Piutang Dagang xxx Cr. Penjualan xxx Cr. PPN Keluaran xxx	Dr. Kas/Piutang Dagang xxx Cr. Penjualan xxx Cr. PPN Keluaran xxx Dr. Harga Pokok Penjualan xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx
Retur Penjualan	Dr. Retur Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx	Dr. Retur Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Harga Pokok Penjualan xxx

Pada akhir periode perusahaan akan melakukan perhitungan fisik atas persediaan. Apabila terdapat perbedaan persediaan barang dagang yang di gudang dengan yang dicatat oleh bagian akuntansi maka akan dilakukan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi. Penyesuaian dilakukan tanpa memperhitungkan PPN.

Transaksi	Sistem Periodik	Sistem Perpetual
Penyesuaian selisih barang		
Perhitungan fisik > catatan akuntansi	-	Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Harga Pokok Penjualan xxx
Perhitungan fisik < catatan akuntansi	-	Dr. Harga Pokok Penjualan xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx

Penyesuaian akhir periode		
Menutup persediaan awal	Dr. Ikhtisar Laba Rugi xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx	-
Memunculkan persediaan akhir sesuai perhitungan fisik	Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Ikhtisar Laba Rugi xxx	-

PPN Masukan dan PPN Keluaran dari pembelian dan penjualan barang dagang akan dilaporkan setiap akhir periode. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka timbul piutang pajak. Sebaliknya, jika PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran, maka timbul hutang pajak.

Transaksi	Jurnal
PPN Masukan > PPN Keluaran	Dr. Piutang Pajak xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. PPN Masukan xxx <u>Saat menerima pengembalian pajak:</u> Dr. Kas xxx Cr. Piutang Pajak xxx
PPN Masukan < PPN Keluaran	Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Hutang Pajak xxx Cr. PPN Masukan xxx <u>Saat melunasi kekurangan pajak:</u> Dr. Hutang Pajak xxx Cr. Kas xxx

2.3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Jaya Surya Integrasi

Berikut ini contoh akuntansi pajak atas transaksi di CV Jaya Surya Integrasi.

Waktu dan besarnya nilai transaksi hanya contoh dari beberapa transaksi yang pernah terjadi di CV Jaya Surya Integrasi.

- 1 September 2020 Persediaan di gudang sebanyak 10 unit Printer @ Rp 600.000
- 2 September 2020 Menjual 5 unit Printer @ Rp 1.000.000 (belum termasuk PPN)
- 9 September 2020 Membeli 10 unit Printer @ Rp 660.000 (sudah termasuk PPN)
- 11 September 2020 Mengembalikan 1 unit Printer yang dibeli tanggal 9 September 2020
- 23 September 2020 Menerima pelunasan dari pelanggan Rp 7.700.000
- 29 September 2020 Menjual 10 unit Printer @ Rp 1.100.000 (sudah termasuk PPN)
- 30 September 2020 Persediaan di gudang sebanyak 4 unit Printer

Jurnal transaksi untuk CV Jaya Surya Integrasi dapat dicatat dengan dua sistem sebagai berikut:

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)																
2 Sept 20	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Piutang Dagang</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Penjualan</td> <td style="text-align: right;">5.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">PPN Keluaran</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> </table>	Piutang Dagang	5.500.000	Penjualan	5.000.000	PPN Keluaran	500.000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Piutang Dagang</td> <td style="text-align: right;">5.500.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Penjualan</td> <td style="text-align: right;">5.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">PPN Keluaran</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td>HPP</td> <td style="text-align: right;">3.000.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Persediaan Brg Dgg</td> <td style="text-align: right;">3.000.000</td> </tr> </table>	Piutang Dagang	5.500.000	Penjualan	5.000.000	PPN Keluaran	500.000	HPP	3.000.000	Persediaan Brg Dgg	3.000.000
Piutang Dagang	5.500.000																	
Penjualan	5.000.000																	
PPN Keluaran	500.000																	
Piutang Dagang	5.500.000																	
Penjualan	5.000.000																	
PPN Keluaran	500.000																	
HPP	3.000.000																	
Persediaan Brg Dgg	3.000.000																	

Perhitungan:

Harga jual barang = 5 unit x Rp 1.000.000	= Rp 5.000.000
PPN = 10% x Rp 5.000.000	= <u>Rp 500.000</u>
Total	= Rp 5.500.000
HPP = 5 unit x Rp 600.000	= Rp 3.000.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
9 Sept 20	Pembelian 6.000.000 PPN Masukan 600.000 Hutang Dagang 6.600.000	Persediaan 6.000.000 PPN Masukan 600.000 Hutang Dagang 6.600.000

Perhitungan:

Harga jual barang = 10 unit x 100/110 x Rp 660.000 = Rp 6.000.000

PPN = 10% x Rp 6.000.000 = Rp 600.000

Total = 10 unit x Rp 660.000 = **Rp 6.600.000**

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
11 Sept 20	Hutang Dagang 660.000 Retur Pembelian 600.000 PPN Masukan 60.000	Hutang Dagang 660.000 Retur Pembelian 600.000 PPN Masukan 60.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
23 Sept 20	Cash 7.700.000 Piutang Dagang 7.700.000	Cash 7.700.000 Piutang Dagang 7.700.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
29 Sept 20	Piutang Dagang 11.000.000 Penjualan 10.000.000 PPN Keluaran 1.000.000	Piutang Dagang 11.000.000 Penjualan 10.000.000 PPN Keluaran 1.000.000 HPP 6.000.000 Persediaan Brg Dgg 6.000.000

Perhitungan:

Harga jual barang = 10 unit x 100/110 x Rp 1.100.000 = Rp 10.000.000

PPN = 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000

Total = 10 unit x Rp 1.100.000 = **Rp 11.000.000**

HPP = 10 unit x Rp 600.000 = **Rp 6.000.000**

Kartu persediaan CV Jaya Surya Integrasi menunjukkan perhitungan sebagai berikut:

Tgl	Barang Masuk	Barang Keluar	Saldo Persediaan
1/9			10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000
2/9		5 unit @ Rp 600.000 = Rp 3.000.000	5 unit @ Rp 600.000 = Rp 3.000.000
9/9	10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000		15 unit @ Rp 600.000 = Rp 9.000.000
11/9		1 unit @ Rp 600.000 = Rp 600.000	14 unit @ Rp 600.000 = Rp 8.400.000
29/9		10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000	4 unit @ Rp 600.000 = Rp 2.400.000

Persediaan akhir 30 September 2020 = **Rp 2.400.000**

Penyesuaian akhir periode:

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
30 Sept 20	Ikhtisar Laba Rugi 6.000.000	-
	Persediaan 6.000.000	
	Persediaan 2.400.000	
	Ikhtisar Laba Rugi 2.400.000	

Buku Besar untuk PPN Masukan dan PPN Keluaran menunjukkan saldo sebagai berikut:

Nama Perkiraan: PPN Masukan

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1/9	Saldo awal	-	-	-
9/9	Pembelian	600.000	-	600.000
11/9	Retur Pembelian	-	60.000	540.000
30/9	Saldo akhir	600.000	60.000	540.000

Nama Perkiraan: PPN Keluaran

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1/9	Saldo awal	-	-	-
2/9	Penjualan	-	500.000	500.000
29/9	Penjualan	-	1.000.000	1.500.000
30/9	Saldo akhir	-	1.500.000	1.500.000

Karena PPN Masukan < PPN Keluaran, maka CV Jaya Surya Integrasi membuat jurnal sebagai berikut:

Transaksi	Jurnal
PPN Masukan < PPN Keluaran	PPN Keluaran 1.500.000
	Hutang Pajak 960.000
	PPN Masukan 540.000
	<u>Saat melunasi kekurangan pajak:</u>
	Hutang Pajak 960.000
	Kas 960.000

MODUL 3

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

A. Tujuan:

1. Pihak mitra memahami peraturan pajak dengan Pajak Penghasilan.
2. Pihak mitra memahami akuntansi untuk Pajak Penghasilan.

B. Pembahasan:

3.1. Pajak Penghasilan

Ketentuan tentang Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi dan badan. Salah satu pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yaitu pajak atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan.

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan dari pendapatan/gaji karyawan. Pajak yang telah dipotong akan disetorkan perusahaan ke pemerintah. Karyawan akan menerima pendapatan/gaji setelah dipotong pajak. Tarif PPh Pasal 21 diatur sebagai berikut:

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

PPh Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas sewa tanah dan bangunan. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar 10% untuk sewa tanah dan bangunan. Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

PT A menyewa sebuah kantor dengan harga Rp 50.000.000 per tahun, maka PPh 4 ayat 2 yang dikenakan atas sewa kantor tersebut adalah $10\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$.

Selain itu, juga ada PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh Pasal 23 adalah sebesar 2% atas sewa dan jasa lainnya. Contoh perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: PT A menyewa mobil kepada PT B sebesar Rp 300.000 sehari maka PPh pasal 23 yang dikenakan atas sewa mobil tersebut adalah $2\% \times 300.000 = \text{Rp } 60.000$.

PP No 23 yang menggantikan PP No. 46 mengatur tentang pajak untuk perusahaan atau orang pribadi yang menjalankan usaha/dagang yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 M setahun. PPh yang dikenakan adalah dengan tarif 0,5 % dari peredaran bruto (omset). Contoh : PT AAA memiliki omzet penjualan Rp 2.000.000.000 setahun, maka pajak penghasilan yang dikenakan atas omzet PT AAA tersebut adalah PP No.23 yang berjumlah $0,5\% \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 10 \text{ juta}$ setahun .Pembayaran PP No.23 dilakukan setiap bulan dengan melihat omzet bulanan. PP No.23 ini sering disebut PPH Final UMKM.

3.2. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Penerapannya di CV Jaya Surya Integrasi

Akuntansi pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan pencatatan yang dilakukan dari sisi perusahaan/pemberi kerja. Adapun pencatatan yang dilakukan adalah:

Jurnal pada saat pembebanan gaji

Dr. Beban Gaji	xxx	
Dr. Beban PPh 21	xxx	
Cr. Bank/ kas		xxx
Cr. Hutang PPh 21		xxx

Jurnal pada saat pembayaran hutang pph 21

Dr. Hutang PPh 21	xxx	
Cr. Bank/kas		xxx

Dikenakan atas gaji/bonus/penghasilan dan sejenisnya yang diperoleh oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan tiap bulannya. Misalnya total gaji yang

diberikan kepada para pegawai adalah Rp 6.500.000 maka tidak dikenakan Pph 21 karena masing-masing karyawan tidak mencapai PTKP sebulan yaitu Rp 4.500.000.

Jurnalnya pada saat pembebanan gaji

Dr. Beban Gaji	Rp 6.400.000	-
Dr. Beban PPh 21	0	-
Cr. Bank/ kas		Rp 6.400.000
Cr. Hutang PPh 21		0

Jurnalnya pada saat pembayaran hutang pph 21

Dr. Hutang PPh 21	0	-
Cr. Bank/kas	-	0

3.3. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan Penerapannya di CV Jaya Surya Integrasi

PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2. Akuntansi pajak untuk PPh Pasal 23 dibedakan menjadi pencatatan dari pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal dari pihak yang menyewa:

Jurnal pada saat pembebanan sewa :

Dr. Beban Sewa/sewa dibayar dimuka	xxx
Dr. PPN Masukan	xxx
Cr. Hutang PPh pasal 23	xxx
Cr. Bank/Kas	xxx

Jurnalnya pada saat pembayaran hutang PPh 23

Dr. Hutang PPh 23	xxx
Cr. Bank/kas	xxx

Jurnal dari pihak yang menyewakan:

Dr. Bank/kas	xxx
Dr. PPh pasal 23 dibayar dimuka	xxx
PPN Keluaran	xxx
Pendapatan sewa	xxx

Salah satu yang diatur oleh PPh pasal 23 adalah sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta selain yang dikenakan oleh PPh pasal 4 ayat 2. CV Jaya Surya Integrasi terkadang melakukan penyewaan laptop dari perusahaan lain. Dan atas transaksi ini akan dikenakan PPh pasal 23 sebanyak 2 % dari harga sewa.

Jurnalnya pada saat pembebanan sewa :

Dr. Beban Sewa/sewa dibayar dimuka	Rp 4.000.000
Dr. PPN Masukan	Rp 400.000
Cr. Hutang PPh pasal 23	- Rp 80.000
Cr. Bank/Kas	- Rp 4.320.000

Jurnalnya pada saat pembayaran hutang PPh 23

Dr. Hutang PPh 23	Rp 80.000
Cr. Bank/kas	- Rp 80.000

3.4. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2) dan Penerapannya di CV Jaya Surya Integrasi

PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan atas sewa tanah dan bangunan. Akuntansi pajak untuk PPh Pasal 4 ayat 2 sama dengan akuntansi pajak untuk PPh Pasal 23, yaitu dibedakan menjadi pencatatan dari pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal dari pihak yang menyewa:

Jurnal pada saat pembebanan sewa :

Dr. Sewa dibayar dimuka	xxx
Dr. PPN Masukan	xxx
Cr. Hutang PPh pasal 4 ayat 2	xxx
Cr. Bank/Kas	xxx

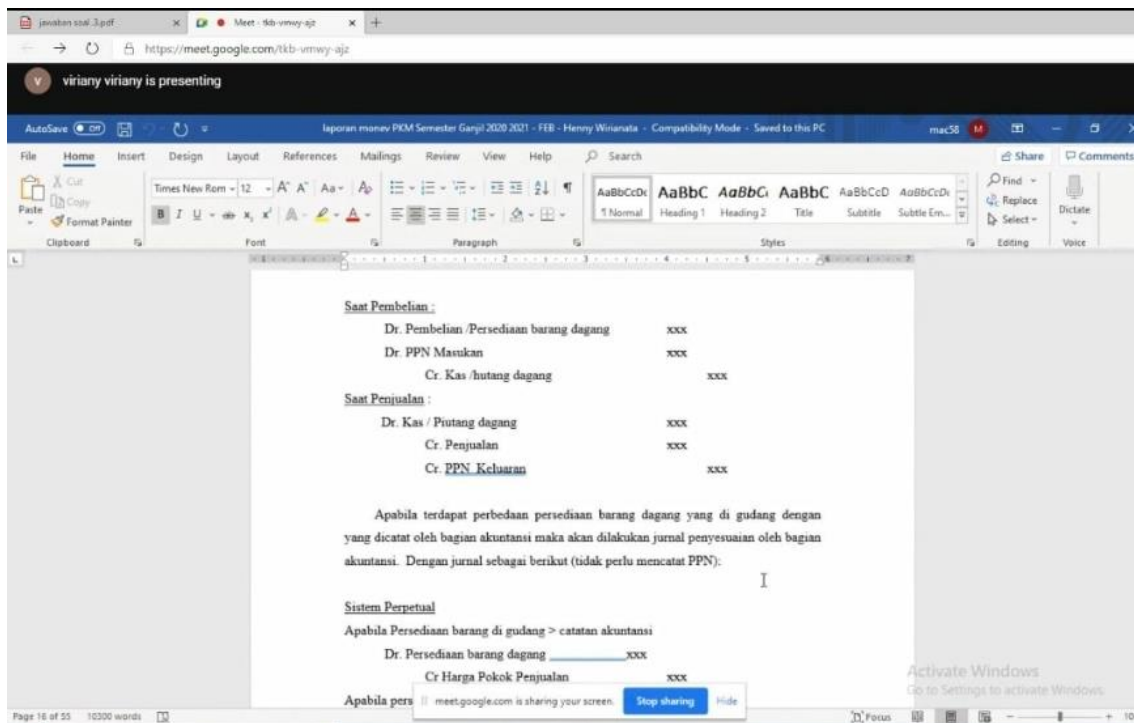
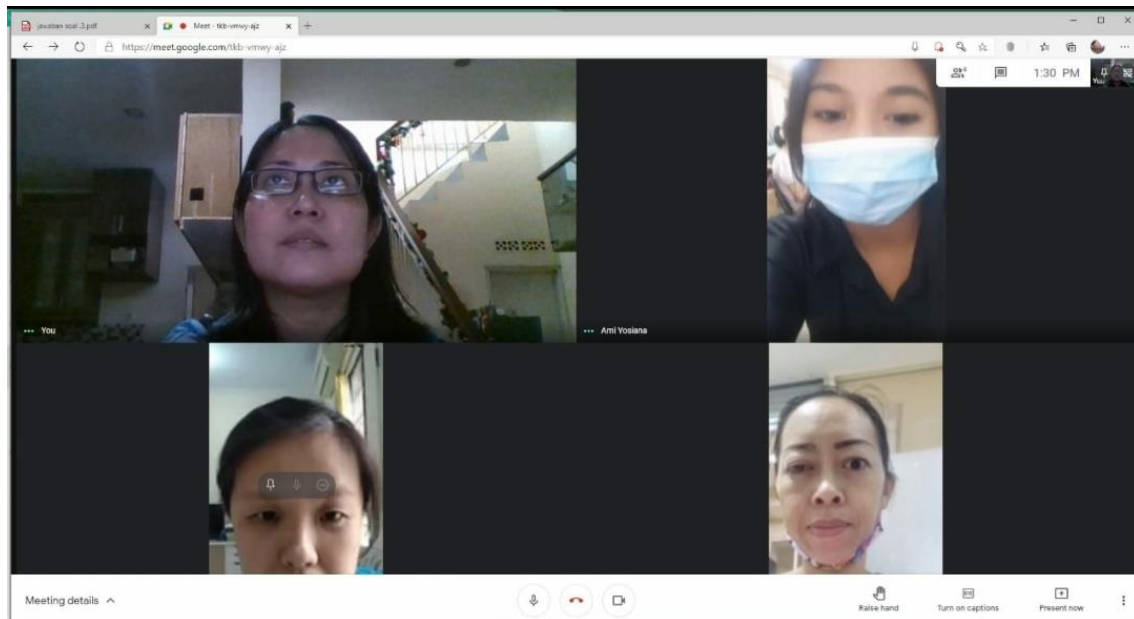
Jurnal pada waktu membayar hutang PPh pasal 4 ayat 2

Dr. Hutang PPh pasal 4 ayat 2	xxx
Cr. Bank/kas	xxx

Jurnal dari pihak yang menyewakan:

Dr. Bank/kas	xxx
Dr. Beban PPh 4 ayat 2	xxx
Cr. PPN Keluaran	xxx
Cr. Pendapatan sewa	xxx

Lampiran 2 Dokumentasi



perhitungan fisik

Tabel 4.3. Jurnal Piutang Pajak dan Hutang Pajak

Transaksi		Jurnal	
PPN Masukan >	PPN Keluaran	Dr. Piutang Pajak	xxxx
		Dr. PPN Keluaran	xxxx
		Cr. PPN Masukan	xxxx
<u>Saat menerima pengembalian pajak:</u>			
		Dr. Kas	xxxx
		Cr. Piutang Pajak	xxxx

2

2.2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Salah satunya pajak, jenis pajak pertambahan dan pengisian hutang dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

Transaksi	Sistem Perikah	Sistem Perputih
Pembelian barang Dagang	Dr. Pembelian xxx Cr. PPN Masukan xxx Cr. Kewajiban Dagang xxx	Dr. Pembelian Dag Dagang xxx Dr. PPN Masukan xxx Cr. Kewajiban Dagang xxx
Pembelian barang Dagang	Dr. Pembelian xxx Cr. PPN Masukan xxx	Dr. Pembelian Dag Dagang xxx Dr. PPN Masukan xxx
Penjualan barang Dagang	Dr. Kas/Piutang Dagang xxx Cr. Pembelian xxx Cr. PPN Keluaran xxx	Dr. Kas/Piutang Dagang xxx Dr. Pembelian Dag Dagang xxx Cr. PPN Keluaran xxx
Penjualan barang Dagang	Dr. Bantu Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx	Dr. Bantu Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx

Pada akhir periode perusahaan akan melakukan perhitungan fisik atas persediaan. Apabila terdapat perbedaan persediaan barang dagang yang di gantung dengan yang dicatat oleh bagian akuntansi maka akan dilakukan jurnal penyesuaian oleh bagian akuntansi. Proses ini dilakukan untuk memperbaharui PPN.

Transaksi	Sistem Perikah	Sistem Perputih
Perhitungan persediaan barang Dagang		Dr. Pembelian Dag Dagang xxx Cr. Harga Pokok Penjualan xxx

(5)

viriany viriany (You)

Henny Wirianata >

Kwee Ayлина Got... >

Henny Wirianata >

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Kerjasama dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joni
Pimpinan Mitra : CV Jaya Surya Integrasi
Bidang Kegiatan : Perdagangan
Alamat : Jalan H Midi No.22 Cengkayang, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

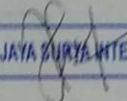
Nama Ketua Tim Pengusul : Henny Wirianata
Program Studi/Pakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 September 2020

Yang Menyatakan


CV. JAYA SURYA INTEGRASI

(Joni)
Direktur

PELATIHAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV JAYA SURYA INTEGRASI

Henny Wirianata¹, Viriany²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: hennyw@fe.untar.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: viriany@fe.untar.ac.id

ABSTRAK

CV Jaya Surya Integrasi merupakan salah satu wajib pajak badan yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajak seperti layaknya Pengusaha Kena Pajak lainnya. CV Jaya Surya Integrasi belum memiliki catatan akuntansi perpajakan yang jelas. Tim PKM Untar pada kesempatan kali ini telah melakukan pelatihan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai yang timbul dari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang di CV Jaya Surya Integrasi. Pelatihan dilakukan secara *online* mengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir dan perlu melakukan *social distancing*. Media yang digunakan adalah Microsoft Teams dan Google Meet. Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak mitra, CV Jaya Surya Integrasi dapat memahami ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan UMKM. Pihak mitra juga telah memahami akuntansi pajak yang disampaikan dan telah menerapkan akuntansi pajak tersebut dalam pembukuannya. Dengan menerapkan akuntansi pajak secara benar maka diharapkan akan memudahkan CV Jaya Surya Integrasi untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak kepada pemerintah.

Kata Kunci: Pelatihan, Akuntansi Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

CV Jaya Surya Integrasi is one of the entity taxpayers that does tax reporting and payment like other taxable entities. CV Jaya Surya Integrasi does not yet have a clear tax accounting record. Our Untar Community Service team on this occasion has conducted training related to tax accounting for Value Added Tax arising from the purchase and sale of merchandise transactions at CV Jaya Surya Integrasi. The training is conducted online considering the current state of the Covid-19 pandemic is not over and needs to do social distancing. The media used are Microsoft Teams and Google Meet. Based on the results of the training activities carried out can be concluded that CV Jaya Surya Integrasi can understand the applicable tax provisions in Indonesia especially related to MSMEs. CV Jaya Surya Integrasi has also understood the tax accounting submitted and has implemented the tax accounting in its bookkeeping. By applying tax accounting correctly, it is expected to facilitate CV Jaya Surya Integrasi to perform better tax calculations and reporting to the government.

Keywords: Training, Tax Accounting, Value Added Tax

1. PENDAHULUAN

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017). Pajak dapat dikenakan secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pajak yang dikenakan secara langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan contoh pajak yang tidak dikenakan secara langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai salah satu wajib pajak, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan pendampingan dalam membukukan aspek perpajakan atas transaksi yang dilakukannya.

Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0,5% untuk UMKM orang pribadi dan UMKM badan yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 milyar. Namun, ketentuan ini berlaku hanya 7 tahun untuk UMKM orang pribadi dan 3 tahun untuk UMKM badan. Setelah berakhirnya masa tersebut maka perhitungan pajak penghasilan UMKM baik UMKM orang pribadi maupun badan akan mengikuti ketentuan Pajak Penghasilan pasal 17 yang sama dengan pelaku usaha yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 milyar. Oleh karena itu, penting bagi UMMKM memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan agar UMKM siap secara pembukuan dan administrasi.

Sandra, et. al. (2019) melakukan kegiatan PKM dalam bentuk pendampingan pajak UMKM. Kegiatan PKM tersebut dalam bentuk pembuatan pembukuan sederhana bagi wajib pajak UMKM di wilayah Pulo Gadung. Dalam kegiatannya tersebut, Sandra, et. al. (2019) mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM sehingga meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM. Kegiatan PKM dari Tim Untar juga akan melakukan hal yang sama, dimana kegiatan PKM dilakukan dengan memberikan pelatihan akuntansi pajak sebagai salah satu bentuk pendampingan pajak bagi UMKM.

CV Jaya Surya Integrasi merupakan perusahaan dagang yang melakukan jual beli produk-produk yang berhubungan dengan komputer. Produk-produk yang dijual diantaranya adalah Laptop, Printer, PC, dan perlengkapan komputer lainnya. CV Jaya Surya Integrasi melakukan transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Pelanggan CV Jaya Surya Integrasi ada yang perorangan dan ada perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 maka CV Jaya Surya Integrasi wajib membayar dan melaporkan PPN atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Perusahaan belum memiliki pencatatan akuntansi yang jelas terutama yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi perpajakan. Melihat skala operasional CV Jaya Surya Integrasi yang semakin berkembang, maka CV Jaya Surya Integrasi dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang termasuk Pengusaha Kena Pajak atau yang biasa disebut sebagai PKP.

Catatan akuntansi terutama transaksi pembelian dan penjualan sangat penting bagi PKP karena berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelaku UMKM akan menimbulkan PPN Masukan, sementara transaksi penjualan akan menimbulkan PPN Keluaran. Pencatatan atas PPN akan diperhitungkan disetiap akhir periode untuk menentukan kewajiban perpajakan dari perusahaan mitra.

Oleh karena itu, dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Tim Universitas Taumanagara diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi perusahaan yang belum memiliki pencatatan yang benar tentang semua transaksi yang terjadi di perusahaan terutama yang berkaitan dengan perpajakan yang dilakukan oleh CV Jaya Surya Integrasi.

2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi yang dilakukan tim PKM Untar dengan pihak CV Jaya Surya Integrasi maka disepakati pelatihan akuntansi perpajakan dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan media *Google Meet* dan *Microsoft Teams*. Hal ini mengingat kondisi pandemi Covid 19 yang belum berakhir dan tidak memungkinkan untuk melakukan pelatihan secara luring (tatap muka). Pelatihan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu:

1. Tanggal 9 Oktober 2020, waktu pelatihan 2 jam.
2. Tanggal 16 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.
3. Tanggal 23 Oktober 2020, waktu pelatihan 1,5 jam.

Nana Sudjana (2010) menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan dalam memberikan pelatihan, yaitu : metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan eksperimen, metode sosiodrama (*role-playing*), metode *problem solving*, metode sistem regu (*team teaching*), metode latihan (*drill*), metode karyawisata (*Field-trip*), metode survai masyarakat, dan metode simulasi. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan.

Metode penyampaian materi yang digunakan pada kegiatan PKM kali ini adalah antara beberapa metode yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan menggunakan kondisi nyata yang sedang terjadi di CV Jaya Surya Integrasi terutama kondisi nyata yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan yang terjadi di perusahaan. Materi pelatihan disampaikan dalam bentuk *mini webinar*. Materi pelatihan diberikan kepada CV Jaya Surya Integrasi dalam bentuk *softcopy* (PDF) dari luaran PKM yang dihasilkan. Luaran PKM yang dihasilkan adalah modul Akuntansi Perpajakan untuk CV Jaya Surya Integrasi yang terdiri dari 2 modul.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modul Akuntansi Perpajakan untuk CV Jaya Surya Integrasi yang disampaikan pada saat pelatihan terdiri dari 2 modul, yaitu:

1. Modul 1 Pendahuluan yang membahas definisi pajak, jenis pajak, pengertian pembukuan bagi wajib pajak
2. Modul 2 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembahasan modul dilakukan dalam 3 *mini webinar* melalui *Google Meet* dan *Microsoft Teams*.

3.1. Pelatihan I

Pelatihan I dilakukan pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 2 jam. Dalam pelatihan ini, Tim PKM Untar memaparkan materi pada Modul 1. Tujuan pemaparan materi pada Modul 1 adalah agar pihak mitra UMKM memiliki pengetahuan dasar tentang pengertian pajak, Laporan Keuangan UMKM, dan pentingnya akuntansi pajak bagi UMKM. Pemaparan materi lebih banyak membahas tentang penjelasan teoritis dan pengetahuan secara konsep.

Pada pemaparan materi pengertian pajak, Tim PKM Untar juga memaparkan tentang Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada pihak mitra UMKM.

Setelah itu dilakukan pemaparan tentang Laporan Keuangan UMKM. Materi yang disampaikan lebih kepada penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan

dengan penyusunan Laporan Keuangan UMKM. Sementara, untuk cara penyusunan Laporan Keuangan telah disampaikan pada pihak mitra pada kegiatan PKM yang sebelumnya.

Inti dari Modul 1 adalah pada pemaparan materi berikutnya tentang akuntansi perpajakan bagi UMKM. Dalam kesempatan ini, Tim PKM Untar memaparkan landasan hukum kenapa diperlukan akuntansi perpajakan, tujuan akuntansi perpajakan, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi perpajakan di Indonesia. Selain itu, Tim PKM Untar juga menjelaskan tentang pentingnya akuntansi perpajakan bagi UMKM dengan berkaca pada pengalaman terjadinya kesalahan-kesalahan pada UMKM lain dalam menerapkan akuntansi perpajakan.

Setelah dilakukan pemaparan materi dari Modul 1, Tim PKM Untar memberikan kesempatan kepada mitra UMKM untuk melakukan tanya jawab agar pihak mitra UMKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilakukan pada pelatihan I dapat dilihat bahwa pihak mitra UMKM dapat memahami materi yang disampaikan.

3.2. Pelatihan II

Pemaparan materi dari Modul 2 dibagi dalam 2 pelatihan, yaitu pelatihan II dan III. Pelatihan II diadakan pada hari Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 1,5 jam. Dalam pelatihan II, Tim PKM Untar melakukan pemaparan tentang materi pada Modul 2. Tujuan pertama Modul 2 adalah agar pihak mitra UMKM memahami peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Modul 2 bertujuan untuk memberikan pemahaman akuntansi perpajakan untuk PPN.

Pemaparan materi diawali dengan penjelasan tentang Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yaitu tentang peraturan perpajakan atas PPN untuk pembelian dan penjualan barang dagang di Indonesia. Penjelasan disertai dengan contoh aplikasi dari undang-undang tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan tentang akuntansi perpajakan untuk PPN dari pembelian dan penjualan barang dagang.

Tim PKM Untar memberikan penjelasan tentang konsep dan cara membukukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang di Indonesia yang dikenakan PPN. Penjelasan mencakup pembuatan jurnal untuk transaksi pembelian barang dagang, retur pembelian, penjualan barang dagang, retur penjualan, dan jurnal penyesuaian di akhir periode. Selain itu, pihak mitra diberikan penjelasan tentang kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang pajak atau hutang pajak bagi pihak mitra UMKM atas transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Tabel 1 – 3 berikut ini menjelaskan akuntansi perpajakan untuk PPN yang disampaikan pada pelatihan II.

Tabel 1. Jurnal Pembelian dan Penjualan Barang Dagang Dengan PPN

Transaksi	Sistem Periodik		Sistem Perpetual	
Pembelian Barang Dagang	Dr. Pembelian Dr. PPN Masukan Cr. Kas/Hutang Dagang	xxx xxx xxx	Dr. Persediaan Brg Dagang Dr. PPN Masukan Cr. Kas/Hutang Dagang	xxx xxx xxx
Retur Pembelian	Dr. Kas/Hutang Dagang Cr. Retur Pembelian Cr. PPN Masukan	xxx xxx xxx	Dr. Kas/Hutang Dagang Cr. Persediaan Brg Dagang Cr. PPN Masukan	xxx xxx xxx
Penjualan Barang	Dr. Kas/Piutang Dagang Cr. Penjualan	xxx xxx	Dr. Kas/Piutang Dagang Cr. Penjualan	xxx xxx

Dagang	Cr. PPN Keluaran xxx	Cr. PPN Keluaran xxx Dr. Harga Pokok Penjualan xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx
Retur Penjualan	Dr. Retur Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx	Dr. Retur Penjualan xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Kas/Piutang Dagang xxx Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Harga Pokok Penjualan xxx

Tabel 2. Jurnal Penyesuaian Akhir Periode

Transaksi	Sistem Periodik	Sistem Perpetual
Penyesuaian selisih barang		
Perhitungan fisik > catatan akuntansi	-	Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Harga Pokok Penjualan xxx
Perhitungan fisik < catatan akuntansi	-	Dr. Harga Pokok Penjualan xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx
Penyesuaian akhir periode		
Menutup persediaan awal	Dr. Ikhtisar Laba Rugi xxx Cr. Persediaan Brg Dagang xxx	-
Memunculkan persediaan akhir sesuai perhitungan fisik	Dr. Persediaan Brg Dagang xxx Cr. Ikhtisar Laba Rugi xxx	-

Tabel 3. Jurnal Piutang Pajak dan Hutang Pajak

Transaksi	Jurnal
PPN Masukan > PPN Keluaran	Dr. Piutang Pajak xxx Dr. PPN Keluaran xxx Cr. PPN Masukan xxx <u>Saat menerima pengembalian pajak:</u> Dr. Kas xxx Cr. Piutang Pajak xxx
PPN Masukan < PPN Keluaran	Dr. PPN Keluaran xxx Cr. Hutang Pajak xxx Cr. PPN Masukan xxx <u>Saat melunasi kekurangan pajak:</u> Dr. Hutang Pajak xxx Cr. Kas xxx

Pemaparan materi pada pelatihan II merupakan pemaparan dari segi teori, konsep, dan peraturan perpajakan di Indonesia. Pemaparan Modul 2 dilanjutkan pada pelatihan III yang menjelaskan penerapan akuntansi perpajakan atas PPN untuk transaksi dan pembukuan di pihak mitra UMKM, CV Jaya Surya Integrasi.

Selama pelatihan II berlangsung, pihak mitra UMKM dan Tim PKM Untar juga melakukan diskusi dan tanya jawab. Sebagai PKP, CV Jaya Surya Integrasi telah melakukan kewajiban perpajakan terkait PPN namun masih belum menerapkan

akuntansi perpajakan untuk PPN. Setelah berakhirnya pelatihan II dapat dikatakan bahwa pihak mitra UMKM telah memiliki pengetahuan secara konseptual tentang peraturan perpajakan dan akuntansi perpajakan terkait PPN.

3.3. Pelatihan III

Pelatihan III dilakukan pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 pukul 15.00 selama 1,5 jam. Pelatihan III melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan pada pelatihan II. Pada pelatihan III, materi yang disampaikan merupakan penerapan akuntansi perpajakan pada pembukuan CV Jaya Surya Integrasi. Tim PKM Untar menggunakan contoh beberapa transaksi yang pernah terjadi di CV Jaya Surya Integrasi.

Pelatihan III dilakukan dengan metode diskusi untuk membahas penerapan akuntansi perpajakan atas PPN yang timbul dari pembelian dan penjualan barang dagang yang dilakukan CV Jaya Surya Integrasi. Berikut ini contoh penerapan akuntansi perpajakan atas transaksi di CV Jaya Surya Integrasi yang dibahas pada pelatihan III.

1 September 2020	Persediaan di gudang sebanyak 10 unit Printer @ Rp 600.000
2 September 2020	Menjual 5 unit Printer @ Rp 1.000.000 (belum termasuk PPN)
9 September 2020	Membeli 10 unit Printer @ Rp 660.000 (sudah termasuk PPN)
11 September 2020	Mengembalikan 1 unit Printer yang dibeli tanggal 9 September 2020
23 September 2020	Menerima pelunasan dari pelanggan Rp 7.700.000
29 September 2020	Menjual 10 unit Printer @ Rp 1.100.000 (sudah termasuk PPN)
30 September 2020	Persediaan di gudang sebanyak 4 unit Printer

Berdasarkan contoh transaksi di atas, pencatatan jurnal transaksi untuk CV Jaya Surya Integrasi dijelaskan dengan dua sistem pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Sistem Periodik (d/m Rp)	Sistem Perpetual (d/m Rp)																
2 Sept 20	<table border="0"> <tr> <td>Piutang Dagang</td> <td>5.500.000</td> </tr> <tr> <td> Penjualan</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td> PPN Keluaran</td> <td>500.000</td> </tr> </table>	Piutang Dagang	5.500.000	Penjualan	5.000.000	PPN Keluaran	500.000	<table border="0"> <tr> <td>Piutang Dagang</td> <td>5.500.000</td> </tr> <tr> <td> Penjualan</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td> PPN Keluaran</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>HPP</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td> Persediaan Brg Dgg</td> <td>3.000.000</td> </tr> </table>	Piutang Dagang	5.500.000	Penjualan	5.000.000	PPN Keluaran	500.000	HPP	3.000.000	Persediaan Brg Dgg	3.000.000
Piutang Dagang	5.500.000																	
Penjualan	5.000.000																	
PPN Keluaran	500.000																	
Piutang Dagang	5.500.000																	
Penjualan	5.000.000																	
PPN Keluaran	500.000																	
HPP	3.000.000																	
Persediaan Brg Dgg	3.000.000																	

Perhitungan:

Harga jual barang = 5 unit x Rp 1.000.000	= Rp 5.000.000
PPN = 10% x Rp 5.000.000	= <u>Rp 500.000</u>
Total	= Rp 5.500.000
HPP = 5 unit x Rp 600.000	= Rp 3.000.000

Tanggal	Sistem Periodik (d/m Rp)	Sistem Perpetual (d/m Rp)												
9 Sept 20	<table border="0"> <tr> <td>Pembelian</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td> PPN Masukan</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td> Hutang Dagang</td> <td>6.600.000</td> </tr> </table>	Pembelian	6.000.000	PPN Masukan	600.000	Hutang Dagang	6.600.000	<table border="0"> <tr> <td>Persediaan</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td> PPN Masukan</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td> Hutang Dagang</td> <td>6.600.000</td> </tr> </table>	Persediaan	6.000.000	PPN Masukan	600.000	Hutang Dagang	6.600.000
Pembelian	6.000.000													
PPN Masukan	600.000													
Hutang Dagang	6.600.000													
Persediaan	6.000.000													
PPN Masukan	600.000													
Hutang Dagang	6.600.000													

Perhitungan:

Harga jual barang = 10 unit x 100/110 x Rp 660.000	= Rp 6.000.000
PPN = 10% x Rp 6.000.000	= <u>Rp 600.000</u>
Total = 10 unit x Rp 660.000	= Rp 6.600.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
11 Sept 20	Hutang Dagang 660.000 Retur Pembelian 600.000 PPN Masukan 60.000	Hutang Dagang 660.000 Retur Pembelian 600.000 PPN Masukan 60.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
23 Sept 20	Cash 7.700.000 Piutang Dagang 7.700.000	Cash 7.700.000 Piutang Dagang 7.700.000

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
29 Sept 20	Piutang Dagang 11.000.000 Penjualan 10.000.000 PPN Keluaran 1.000.000	Piutang Dagang 11.000.000 Penjualan 10.000.000 PPN Keluaran 1.000.000 HPP 6.000.000 Persediaan Brg Dgg 6.000.000

Perhitungan:

Harga jual barang = 10 unit x 100/110 x Rp 1.100.000	= Rp 10.000.000
PPN = 10% x Rp 10.000.000	= Rp 1.000.000
Total = 10 unit x Rp 1.100.000	= Rp 11.000.000
HPP = 10 unit x Rp 600.000	= Rp 6.000.000

Selain membahas pencatatan jurnal, dalam pelatihan III juga dibahas pembuatan Kartu persediaan dan jurnal penyesuaian CV Jaya Surya Integrasi sebagai berikut:

Tgl	Barang Masuk	Barang Keluar	Saldo Persediaan
1/9			10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000
2/9		5 unit @ Rp 600.000 = Rp 3.000.000	5 unit @ Rp 600.000 = Rp 3.000.000
9/9	10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000		15 unit @ Rp 600.000 = Rp 9.000.000
11/9		1 unit @ Rp 600.000 = Rp 600.000	14 unit @ Rp 600.000 = Rp 8.400.000
29/9		10 unit @ Rp 600.000 = Rp 6.000.000	4 unit @ Rp 600.000 = Rp 2.400.000

Persediaan akhir 30 September 2020 = **Rp 2.400.000**

Penyesuaian akhir periode:

Tanggal	Sistem Periodik (dlm Rp)	Sistem Perpetual (dlm Rp)
30 Sept 20	Ikhtisar Laba Rugi 6.000.000 Persediaan 6.000.000 Persediaan 2.400.000 Ikhtisar Laba Rugi 2.400.000	-

Kemudian, dijelaskan tentang *posting* ke Buku Besar untuk PPN Masukan dan PPN Keluaran CV Jaya Surya Integrasi yang menunjukkan saldo sebagai berikut:

Nama Perkiraan: PPN Masukan

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1/9	Saldo awal	-	-	-
9/9	Pembelian	600.000	-	600.000
11/9	Retur Pembelian	-	60.000	540.000
30/9	Saldo akhir	600.000	60.000	540.000

Nama Perkiraan: PPN Keluaran

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1/9	Saldo awal	-	-	-
2/9	Penjualan	-	500.000	500.000
29/9	Penjualan	-	1.000.000	1.500.000
30/9	Saldo akhir	-	1.500.000	1.500.000

Mengacu pada saldo PPN Masukan dan PPN Keluaran di buku besar CV Jaya Surya Integrasi, maka setelah itu dijelaskan penerapan penentuan timbulnya piutang pajak atau hutang pajak. Dengan pembahasan ini, CV Jaya Surya Integrasi dapat menentukan kewajiban perpajakan yang harus dilaporkannya kepada pemerintah. Karena PPN Masukan < PPN Keluaran, maka CV Jaya Surya Integrasi membuat jurnal sebagai berikut:

Transaksi	Jurnal
PPN Masukan < PPN Keluaran	PPN Keluaran 1.500.000
	Hutang Pajak 960.000
	PPN Masukan 540.000
	<u>Saat melunasi kekurangan pajak:</u>
	Hutang Pajak 960.000
	Kas 960.000

Dengan berakhirnya pelatihan III, maka pelatihan akuntansi perpajakan untuk PPN bagi CV Jaya Surya Integrasi telah selesai. Dari pelatihan III, CV Jaya Surya Integrasi telah memahami penerapan akuntansi perpajakan untuk PPN, sehingga CV Jaya Surya Integrasi dapat menghindari terjadinya kesalahan pada perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak mitra, CV Jaya Surya Integrasi dapat memahami ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia terutama yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Pihak mitra juga telah memahami akuntansi pajak yang disampaikan dan telah menerapkan akuntansi pajak tersebut dalam pembukuannya. Dengan menerapkan akuntansi pajak secara benar maka diharapkan akan memudahkan CV Jaya Surya Integrasi untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak kepada pemerintah. Dengan demikian, CV Jaya Surya Integrasi diharapkan dapat menerapkan akuntansi pajak yang telah disampaikan dalam pelatihan ini secara konsisten. Konsistensi dalam penerapan akan membantu CV Jaya Surya

Integrasi untuk memiliki pembukuan yang rapi dengan informasi yang dapat diandalkan, sehingga di masa depan dapat dimanfaatkan dalam memperoleh tambahan dana untuk pengembangan usaha.

Seiring dengan perkembangan usaha, ke depannya pelatihan dapat ditambah dengan penerapan akuntansi pajak yang berkaitan dengan ketentuan pajak lainnya yang terkait dengan UMKM seperti akuntansi pajak untuk Pajak Penghasilan UMKM. Selain itu, pelatihan juga dapat ditambah dengan penggunaan *software* akuntansi sehingga pembukuan pajak CV Jaya Surya Integrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan PKM ini: Rektor Universitas Tarumanagara, LPPM Universitas Tarumanagara, Dekan FEB Universitas Tarumanagara, dan pihak mitra PKM, CV Jaya Surya Integrasi.

5. REFERENSI

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Jakarta.

Resmi, Siti. *Perpajakan*. Edisi 10. Jakarta. Salemba Empat

Sandra, A., Hanif, R. I. Arfianti, dan P. Apriwenni (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics in Action Journal*, Volume 1, Number 1, 2019, 1-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.33021/aia.v1i1.737>

Sudjana, Nana (2010). *Dasar-dasar Proses Belajar*, Bandung. Sinar Baru.

Republik Indonesia (2008). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Republik Indonesia. (2018). PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

<https://solusiukm.com/akuntansi-perpajakan-pada-perusahaan-dan-umkm-mengapa-penting/>

<https://solusiukm.com/4-kesalahan-akuntansi-perpajakan-pada-usaha-kecil-atau-umkm-yang-sering-dilakukan/>

Lampiran 5

BIODATA KETUA TIM PKM

I. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Henny Wirianata, SE, M.Si, Ak, CA
1.2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
1.3.	NIP/NIK/No. identitas lainnya	101 01 020 / 03 210 677 01 / 3603286106770007
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 21 Juni 1977
1.5.	Alamat Rumah	Gading Serpong Sektor 7B Jl. Pelepah Kuning 10 Blok DD6 no. 8 Tangerang 15820
1.6.	Nomor Telepon/Fax	02154203811
1.7.	Nomor HP	081280237125
1.8.	Alamat Kantor	Tanjung Duren Utara No.1
1.9.	Nomor Telepon/Fax	021-5655510
1.10.	Alamat e-mail	hennywirianata@gmail.com
1.11.	Lulusan yang telah dihasilkan	-
1.12.	Mata Kuliah yang sedang/pernah diampu	Pengantar Akuntansi II Akuntansi Keuangan Menengah I Akuntansi Keuangan Menengah II Akuntansi Keuangan Lanjutan I Akuntansi Keuangan Lanjutan II

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2.	Nama PT	UNTAR	Trisakti	-
2.3	Bidang Ilmu	Akuntansi	Akuntansi	-
2.4	Tahun Masuk	1995	2003	-
2.5	Tahun Lulus	1999	2005	-
2.6	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peranan Konsep Biaya Relevan Dalam Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus	Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Publik Pasca Enron: Studi Kasus pada Lima PTS di Jakarta Barat	-
2.7	Nama Pembimbing/Promotor	Drs. D.P. Sinurat	Prof. Dr. Sofyan S. Harahap	-

III. PENGALAMAN PENELITIAN (BUKAN SKRIPSI, TESIS, MAUPUN DISERTASI)

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	LPPI - Untar	Rp 7.500.000
2.	2017	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak	LPPI - Untar	Rp 10.500.000
3	2018	Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Tax Amnesty (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Jakarta Barat)	LPPI - Untar	Rp 10.000.000
4	2018	Pengaruh Corporate Governance dan Capital Expenditure terhadap Cash Holding	LPPI - Untar	Rp 10.000.000
5	2019	Minat Mahasiswa Akuntansi mengikuti USKAD (Studi Empiris di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara)	LPPM - Untar	Rp 13.000.000
6	2019	Mendeteksi earning management melalui aktivitas riil	LPPM - Untar	Rp 10.000.000
7	2020	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan	LPPM - Untar	Rp 10.000.000

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Bukan Skripsi, Tesis Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2008	Tim Pembicara dalam Management Development Program (MDP) Angkatan 4 di PT Nutrifood Indonesia	Mandiri	Rp 500.000,00
2.	2008	Pembicara dalam Pelatihan Financial Accounting di PT INK Kreasi	Mandiri	Rp 500.000,00

3.	2011	Anggota Tim Pembicara Pada Penyuluhan “Tata Kelola Dalam Kehidupan Bermasyarakat” Dalam Rangka HUT Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara ke-52	LPKMV	Rp 10.000.000,00
4.	2012	Pembicara dalam rangka Pengenalan Kampus FE Untar kepada Siswa/Siswi SMA/SMK Se-Jabodetabek	FE UNTAR	Rp 100.000,00
5.	2013	Anggota Tim Pengawas Ujian Nasional SMA/MA/SMK dan Paket C Tahun Pelajaran 2012/2013 Provinsi DKI Jakarta	UNTAR dan Pemerintah	Rp 500.000,00
6.	2013	Anggota Tim Penyusun Modul Akuntansi Koperasi: Menyongsong Era Akuntansi Global Berbasis IFRS	LPKMV	Rp 4.640.000,00
7.	2017	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di Jakarta Barat	DPPM Untar	Rp 1.200.000
8.	2017	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di Jakarta Barat	DPPM Untar	Rp 5.500.000
9.	2018	Pembuatan Standar Operasional Prosedur PT Mitra Persada Optikal (siklus persediaan)	DPPM Untar	Rp 6.000.000
10.	2018	Pembuatan Standar Operasional Prosedur PT Mitra Persada Optikal (siklus penerimaan dan pengeluaran kas)	DPPM Untar	Rp 7.500.000
11.	2019	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi CV JSI	DPPM Untar	Rp 6.000.000
12.	2019	Pembuatan Standar Operasional prosedur CV Jaya Surya Integrasi (siklus penerimaan dan pengeluaran kas)	LPPM Untar	Rp 8.000.000
13.	2020	Pembuatan Standar Operasional Prosedur CV Jaya Surya Integrasi (Siklus persediaan dan penerimaan kas)	LPPM Untar	Rp 8.000.000

**IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL
(Tidak termasuk Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar)**

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1.	2003	Using Derivatives to Reduces Risks	THVII/01/Mei/2003	Jurnal Akuntansi FE Untar
2.	2004	Pengaruh UU Ketenagakerjaan Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia	THVIII/01/Mei/2004	Jurnal Akuntansi FE Untar
3.	2007	Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan Publik Pasca Enron: Studi Kasus pada Lima PTS di Jakarta Barat	THXI/03/September/2007	Jurnal Akuntansi FE Untar
4.	2017	Kompetensi Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Dunia Kerja Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	XXII/03/November/2017	Jurnal Ekonomi FE Untar

Semua data yang saya isikan dantercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima risikonya.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Pengusul



Henny Wirianata, SE, M.Si, Ak, CA

BIODATA ANGGOTA TIM PKM

I. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Viriany, SE, MM, Ak, CA.,BKP
1.2.	Jabatan Fungsional	Lektor
1.3.	NIP/NIK/No. identitas lainnya	0326087602/10101021
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jambi, 26 Agustus 1976
1.5.	Alamat Rumah	Jalan Menteng I gang 2 No.9a
1.6.	Nomor Telepon/Fax	-
1.7.	Nomor HP	08981802325
1.8.	Alamat Kantor	Tanjung Duren Utara No.1
1.9.	Nomor Telepon/Fax	0215655510
1.10.	Alamat e-mail	viriany@fe.untar.ac.id
1.11.	Lulusan yang telah dihasilkan	
1.12.	Mata Kuliah yang sedang/pernah diampu	Pengantar Akuntansi I
		Pengantar Akuntansi II
		Akuntansi Biaya
		Akuntansi Keuangan Menengah I
		Akuntansi Keuangan Lanjutan I
		Akuntansi Keuangan Lanjutan II

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2.	Nama PT	UNTAR	UNTAR	
2.3	Bidang Ilmu	Akuntansi	Manajemen	
2.4	Tahun Masuk	1995	1999	
2.5	Tahun Lulus	2000	2003	
2.6	Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Sistem Informasi Akuntansi pada Hotel Novotel Jambi	Analisis Pengukuran Kinerja pada tiga perusahaan di BEJ dengan metode EVA	
2.7	Nama Pembimbing/Promotor	Drs Soedibyo Soemarman, Ak	Imo Gandakusuma, SE, Ak, MBA	

III. PENGALAMAN PENELITIAN (BUKAN SKRIPSI, TESIS, MAUPUN DISERTASI)

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Pengaruh <i>Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism</i> , dan <i>Firm Size</i> terhadap Keputusan Penjualan Kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	LPPI - Untar	Rp 6.000.000
2	2017	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak	LPPI - Untar	Rp 10.500.000
3.	2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	LPPI - Untar	Rp 7.500.000
4.	2018	Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Jakarta Barat)	LPPI - Untar	Rp 10.000.000
5.	2018	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Capital Expenditure</i> terhadap <i>Cash Holding</i>	LPPI - Untar	Rp 10.000.000
6.	2019	Minat Mahasiswa Akuntansi mengikuti USKAD (Studi Empiris di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara)	LPPI - Untar	Rp 13.000.000
7	2019	Mendeteksi <i>earning management</i> melalui aktivitas riil	LPPI - Untar	Rp 10.000.000

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Bukan Skripsi, Tesis Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	April 2011	Tim Pemantau Independen Ujian Nasional	UNTAR dan Pemerintah	Rp. 500.000
2.	April 2012	Tim Pemantau Independen Ujian Nasional	UNTAR dan Pemerintah	Rp. 500.000

3.	Oktober 2013 (Semester Ganjil 2013)	Pembuatan Modul 5 Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP sebagai anggota	LPKMV UNTAR	Rp. 4.640.000
4.	2017	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di Jakarta Barat	DPPM Untar	Rp 1.200.000
5.	2017	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di Jakarta Barat	DPPM Untar	Rp 5.500.000
6.	2018	Pembuatan Standar Operasional Prosedur PT Mitra Persada Optikal (siklus persediaan dan pembelian)	DPPM Untar	Rp 6.000.000
7.	2018	Pembuatan Standar Operasional Prosedur PT Mitra Persada Optikal (siklus penerimaan dan pengeluaran kas)	DPPM Untar	Rp 7.500.000
8.	2019	Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi CV JSI	DPPM Untar	Rp 6.000.000
9.	2019	Pembuatan Standar Operasional prosedur CV Jaya Surya Integrasi (siklus penerimaan dan pengeluaran kas)	LPPM Untar	Rp 8.000.000
10.	2020	Pembuatan Standar Operasional Prosedur CV Jaya Surya Integrasi (Siklus persediaan dan penerimaan kas)	LPPM Untar	Rp 8.000.000

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk Makalah Seminar/*Proceedings*, Artikel di Surat Kabar)

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1.	2005	Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia periode Juli 1997 – 2002	Volume 1X/No.01	Jurnal Manajemen Publikasi FE UNTAR
2.	2007	Pengaruh Motivasi terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) : Studi Empiris di Universitas Tarumanagara	Volume II/No.03	Jurnal Akuntansi Publikasi FE UNTAR
3.	2008	Waralaba sebagai salah satu	Volume XII/No.	Jurnal Manajemen

4.	2011	alternatif untuk mengembangkan bisnis Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005 – 2007	03 Volume XV/No.02	Publikasi FE UNTAR Jurnal Akuntansi Publikasi FE UNTAR
5	2015	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing saham	Vol 20 No.2 (2015), July 2015	Jurnal Ekonomi
6	2016	Pengaruh ratio keuangan terhadap Financial Distress	Vol 21 No.1 (2016), March 2016	Jurnal Ekonomi
7	2018	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Vol XXIII/01/Maret/2018 ISSN 0854-9842	Jurnal Ekonomi
8	2018	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Orang Pribadi untuk mengikuti Tax Amnesty	Vol 23 No.3 (2018), Nov 2018	Jurnal Ekonomi
9	2019	Corporate Governance, Capital Expenditure and Cash Holding	Vol 24 No.1 (2019) March 2019	Jurnal Ekonomi
10	2020	Mendeteksi Earning Management melalui aktivitas riil	Vol 25 No.1 (2020), March 2020	Jurnal Ekonomi

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/ Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat
-	-	-	-	-

VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/ REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No.	Tahun	Judul/ Tema/ Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-----	-------	---	------------------	-------------------

		Diterapkan		
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima risikonya.

Jakarta, Januari 2021

Anggota Pengusul,



Viriany, SE, MM, Ak, CA, BKP

BIODATA MAHASISWA

NAMA : Felinda Yoe
NIM : 125170393
ALAMAT : Boulevard Raya QF 1/6 Kelapa Gading , Jakarta Utara
TEMPAT/TGL LAHIR : Jakarta, 27 November 2000
E-MAIL : felindayoe2711@gmail.com
NO HP : 0896 5695 5695
DESKRIPSI TUGAS : Membantu pembuatan materi pelatihan dan lainnya

Jakarta, Januari 2021

Felinda Yoe